

Judul : RUU Daerah Kepulauan, DPR fokus bahas akses antarpulau
Tanggal : Sabtu, 03 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Daerah Kepulauan DPR Fokus Bahas Akses Antarpulau

FOTO: FB PRIDIJO



Hendry Munief

SENAYAN terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Salah satu bahasan penting adalah konektivitas antarpulau karena efeknya sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR Hendry Munief mengatakan, ketersediaan transportasi yang memadai menjadi kunci untuk memastikan masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil tetap mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi. Karena itu, konektivitas antarpulau tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan transportasi atau pembangunan infrastruktur.

"Bagi masyarakat kepulauan, transportasi merupakan bagian dari pelayanan dasar karena menentukan mudah atau sulitnya masyarakat memperoleh pendidikan, kesehatan, energi, hingga akses pasar," ujar Hendry di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Hendry, persoalan tersebut dapat dilihat di Provinsi Riau. Sejumlah kabupaten di wilayah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan

Indragiri Hilir memiliki pulau-pulau yang membutuhkan dukungan konektivitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Riau 2025 memiliki 144 pulau. Rinciannya, 36 pulau di Rokan Hilir, 19 pulau di Bengkalis, 12 pulau di Kepulauan Meranti, 43 pulau di Pelalawan, dan 25 pulau di Indragiri Hilir.

Persoalannya, kata dia, adalah bagaimana masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat di daratan. "Ketika transportasi terbatas, maka akses terhadap pendidikan, kesehatan, energi, dan perdagangan juga ikut terdampak," imbuh politisi PKS ini.

Ia mencontohkan, keterbatasan transportasi dapat membuat distribusi barang ke wilayah pulau menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap harga kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan akses juga dapat menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan tenaga pelayanan publik. Guru maupun tenaga kesehatan yang ditugaskan ke wilayah pulau terluar membutuhkan dukungan transportasi dan konektivitas yang memadai agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bila akses transportasinya sulit, tentu ada tantangan untuk menghadirkan guru, tenaga kesehatan, maupun pelayanan pemerintah secara rutin. "Jadi konektivitas perlu menjadi bagian dari kebijakan afirmatif untuk daerah kepulauan," tandas legislator asal Riau ini.

Hendry berpandangan, RUU Daerah Kepulauan perlu memberikan ruang bagi skema layanan transportasi yang sesuai dengan karakter geografis wilayah. ■ TIF